

## Transformasi Digital dan Efektivitas Kebijakan Fiskal terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2011–2024

<sup>1</sup>Anisha Hardianti, <sup>2</sup>Poppy Wulandari, <sup>3</sup>Ulfa Utari, <sup>4</sup>Rahmat Maulidan

<sup>1</sup>Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudra, kota Langsa

<sup>2</sup>Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Medan, kota Medan

<sup>3</sup>Akuntansi, Universitas Samudra, kota Langsa

<sup>4</sup>Manajemen, Universitas Samudra, kota Langsa

E-mail: <sup>1</sup>[anisha.hardianti@unsam.ac.id](mailto:anisha.hardianti@unsam.ac.id), <sup>2</sup>[poppywulandari@polmed.ac.id](mailto:poppywulandari@polmed.ac.id), <sup>3</sup>[ulfautari@unsam.ac.id](mailto:ulfautari@unsam.ac.id),  
<sup>4</sup>[rahmat.maulidan@unsam.ac.id](mailto:rahmat.maulidan@unsam.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan penggunaan internet terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh periode 2011–2024. Ketiga variabel tersebut dipilih untuk menggambarkan peran kebijakan fiskal, dinamika makroekonomi, dan transformasi digital dalam menekan pengangguran di daerah berkembang. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan yang diperoleh dari BPS dan Kemenkeu RI. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan EViews 12, serta diuji melalui asumsi klasik dan uji hipotesis (*t* dan *F test*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh. Variabel belanja bantuan sosial berperan sebagai *automatic stabilizer* yang mampu menekan dampak perlambatan ekonomi terhadap lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran, mendukung keberlakuan Hukum Okun di tingkat daerah. Sementara itu, penggunaan internet memiliki pengaruh paling kuat terhadap penurunan pengangguran, menunjukkan bahwa transformasi digital berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan efisiensi ekonomi daerah. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi digital berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Kata kunci : *pengangguran, belanja bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, penggunaan internet, kebijakan fiskal, transformasi digital*

### ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of social assistance spending, economic growth, and internet usage on the unemployment rate in Aceh Province during the 2011–2024 period. These variables were selected to reflect the role of fiscal policy, macroeconomic dynamics, and digital transformation in reducing unemployment in developing regions. The study employs annual secondary data obtained from the BPS and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, analyzed using multiple linear regression with a time-series approach through EViews 12 software. The analysis includes classical assumption tests and hypothesis testing through *t* and *F* statistics.

The results reveal that social assistance spending, economic growth, and internet usage have a negative and significant effect on unemployment in Aceh Province. Social assistance spending functions as an automatic stabilizer, mitigating the adverse effects of economic slowdown on employment. Economic growth negatively affects unemployment, confirming the validity of Okun's Law at the regional level. Furthermore, internet usage exerts the strongest impact, indicating that digital transformation significantly contributes to job creation and economic efficiency. The findings emphasize that the synergy among fiscal policy, economic growth, and digital transformation plays a crucial role in fostering inclusive and sustainable regional economic development in Aceh Province.

**Keywords:** *unemployment, social assistance spending, economic growth, internet usage, fiscal policy, digital transformation*

## 1. PENDAHULUAN

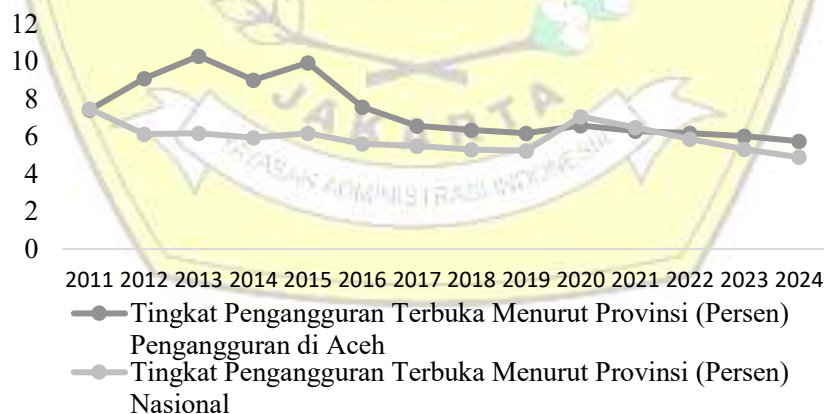
Isu pengangguran masih menjadi persoalan ekonomi yang kompleks dan multidimensi di berbagai negara. Menurut laporan *World Employment and Social Outlook* (ILO Flagship Report, 2024), tingkat pengangguran global pada 2023 mencapai 5,3% dengan jumlah pengangguran lebih dari 190 juta jiwa di seluruh dunia. Dampak pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi pasar tenaga kerja, terutama di negara berkembang, di mana pemulihan ekonomi tidak diikuti peningkatan kesempatan kerja yang sepadan, fenomena yang dikenal sebagai *jobless recovery* (World Bank, 2024). Fenomena ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mampu menciptakan lapangan kerja baru secara signifikan tanpa dukungan kebijakan sosial dan transformasi digital yang inklusif.

Indonesia, sebagai negara dengan struktur ekonomi campuran dan ketergantungan tinggi pada sektor informal, juga menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2024), tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional pada Februari 2024 sebesar 5,12%, turun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih menunjukkan perlambatan

penciptaan lapangan kerja formal. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia hanya meningkat tipis menjadi 69,4%. (Aginta et al., 2025) menemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia masih lemah di wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sektor non-industri, menandakan terjadinya *jobless growth* di beberapa provinsi.

Salah satu daerah yang mencerminkan fenomena ini adalah Provinsi Aceh. Meskipun mendapatkan dukungan fiskal yang besar melalui Dana Otonomi Khusus, tingkat pengangguran di Aceh tetap tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Data (BPS Aceh, 2024) menunjukkan bahwa selama 2011–2024, TPT Aceh berfluktuasi antara 6% hingga 10%, lebih tinggi dibandingkan TPT nasional yang rata-rata 5–6%. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja produktif. Struktur ekonomi Aceh yang masih bergantung pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa publik dengan produktivitas rendah menjadikan masalah pengangguran bersifat kronis.

Gambar 1. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional dan Provinsi Aceh Tahun 2011–2024



Sumber : BPS 2025

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa tren tingkat pengangguran terbuka di Aceh mengalami fluktuasi yang relatif tinggi dibandingkan tren nasional. Puncak pengangguran terjadi pada periode 2013–2015, di mana TPT Aceh mencapai lebih dari 9%, sedangkan nasional hanya sekitar 6%. Setelah tahun 2016, tingkat pengangguran di Aceh memang

menunjukkan tren penurunan, namun masih berada di atas rata-rata nasional hingga tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menciptakan lapangan kerja baru secara berkelanjutan. Rendahnya diversifikasi sektor industri serta ketergantungan terhadap belanja

pemerintah menjadi faktor yang memperlambat proses penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, pengangguran di Aceh bukan hanya permasalahan ekonomi, tetapi juga cerminan efektivitas kebijakan fiskal dan kesiapan digitalisasi ekonomi daerah.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong penyerapan tenaga kerja. Salah satu komponen kebijakan fiskal yang krusial adalah belanja bantuan sosial (bansos). Bansos berfungsi sebagai *automatic stabilizer* untuk menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan tekanan sosial ekonomi di tengah guncangan makro. (Pertiwi et al., 2025) mengemukakan bahwa efektivitas distribusi bansos memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun demikian, penelitian (Aliyah & Yusuf Bahtiar, 2025) menunjukkan bahwa dampak bansos terhadap pengangguran belum konsisten tergantung pada efektivitas penyaluran dan ketepatan sasaran penerima.

Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi secara teoretis berhubungan negatif dengan pengangguran, sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Okun (Okun, 1962). Setiap peningkatan 1% dalam pertumbuhan output di atas potensialnya dapat menurunkan pengangguran sebesar persentase tertentu. (Aginta et al., 2025) menunjukkan bahwa Hukum Okun berlaku di Indonesia, tetapi dengan variasi spasial yaitu wilayah dengan industrialisasi dan investasi yang kuat memiliki elastisitas pengangguran yang lebih tinggi dibanding wilayah berbasis sektor primer. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup tanpa kebijakan pelengkap seperti dukungan fiskal dan digitalisasi ekonomi.

Dalam era digital, penggunaan internet menjadi variabel penting yang turut menentukan dinamika pasar tenaga kerja.

Akses internet meningkatkan efisiensi informasi kerja, mempercepat proses *job matching*, dan membuka peluang kerja baru di sektor digital. (Kusumawardhani et al., 2023) membuktikan bahwa penetrasi internet di Indonesia meningkatkan partisipasi kerja perempuan dan produktivitas UMKM, sedangkan (Yunisvita et al., 2025) menemukan bahwa intensitas penggunaan internet berhubungan positif dengan peningkatan pekerjaan penuh waktu di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital berpotensi menekan pengangguran melalui peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja.

Namun, literatur juga menunjukkan sisi lain dari digitalisasi. (Gayatri et al., 2023) menyoroti adanya *digital divide* yang menyebabkan kesenjangan antara pekerja perkotaan dan pedesaan. (Heriqbaldi, 2023) menambahkan bahwa digitalisasi selama pandemi meningkatkan produktivitas sektor tertentu, tetapi juga mempercepat otomatisasi yang berpotensi menggantikan pekerjaan konvensional. Dalam konteks Aceh, tantangan utama terletak pada rendahnya literasi digital dan belum meratanya infrastruktur jaringan internet, yang membatasi manfaat ekonomi dari transformasi digital.

Kajian-kajian sebelumnya umumnya membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara parsial, tanpa mempertimbangkan peran kebijakan sosial dan transformasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menggabungkan tiga dimensi penting fiskal, makroekonomi, dan digital untuk menjelaskan dinamika pengangguran di Provinsi Aceh. Pendekatan ini sekaligus memperluas penerapan Hukum Okun dengan memasukkan variabel kebijakan sosial dan digitalisasi sebagai determinan tambahan.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis yang kuat. Pemerintah

Aceh perlu memastikan bahwa belanja sosial yang besar melalui Dana Otonomi Khusus tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam menciptakan lapangan kerja. Demikian pula, percepatan digitalisasi ekonomi harus diarahkan untuk memperluas inklusi tenaga kerja dan mendukung aktivitas usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan dasar empiris bagi penguatan kebijakan sosial dan transformasi digital daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal melalui belanja bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi digital yang direpresentasikan oleh penggunaan internet terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh periode 2011–2024. Berdasarkan kajian teoretis dan empiris, ketiga variabel tersebut diduga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.
- H<sub>2</sub>: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.
- H<sub>3</sub>: Penggunaan internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.

## 2. LANDASAN TEORI

Dalam kajian ekonomi pembangunan, pengangguran merupakan fenomena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. (N Greogry Mankiw, 2016) mendefinisikan pengangguran sebagai kondisi ketika sebagian tenaga kerja yang bersedia dan mampu bekerja tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran memiliki

dampak ganda ekonomi dan sosial yang secara langsung menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Bonaraja Purba, 2025) Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tingginya pengangguran menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan sosial (Todaro & Smith, 2015).

Belanja bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan melindungi kelompok rentan. Menurut (KEM PPKF, 2025) belanja sosial berperan sebagai *automatic stabilizer* yang menjaga konsumsi rumah tangga saat ekonomi mengalami tekanan. Secara teori Keynesian, transfer pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah dapat meningkatkan *aggregate demand* sehingga mendorong output dan penyerapan tenaga kerja (Blinder, 1973). (Bonaraja Purba, 2025)) juga menegaskan bahwa program sosial yang efektif mampu memperkuat stabilitas sosial dan mengurangi pengangguran melalui peningkatan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa suatu wilayah dalam periode tertentu, yang diukur menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. (Hasan et al., 2022) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memperluas kesempatan kerja, namun hanya efektif bila diikuti dengan pemerataan sektor produksi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hubungan negatif antara pertumbuhan dan pengangguran dikenal sebagai Hukum Okun, di mana setiap kenaikan pertumbuhan output di atas potensialnya berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran ((Okun, 1962); (Aginta et al., 2025)).

Sementara itu, penggunaan internet sebagai representasi transformasi digital berfungsi meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperluas pasar tenaga kerja. (Kusumawardhani et al., 2023) dan

(Yunisvita et al., 2025) menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia meningkatkan partisipasi kerja, terutama bagi kelompok perempuan dan pelaku usaha mikro. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Gayatri (2022), kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar yang membatasi dampak positif digitalisasi terhadap pasar kerja, terutama di wilayah Aceh.

#### a. Teori Stabilisasi Fiskal

Menurut Keynes (1936) pada (Karl E. Case, Karl E., 2020), pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Belanja bantuan sosial termasuk dalam komponen belanja negara yang berfungsi menjaga konsumsi agregat. Ketika perekonomian melemah, bantuan sosial mampu menahan penurunan permintaan, sehingga menjaga keberlangsungan aktivitas usaha dan lapangan kerja (Blinder, 1973). Dalam konteks daerah, peningkatan alokasi belanja sosial dapat memperluas daya beli masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi lokal, yang pada akhirnya menekan pengangguran (Bonaraja Purba, dkk 2025).

#### b. Hukum Okun (Okun's Law)

Hukum Okun menegaskan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Setiap pertumbuhan output 1% di atas potensialnya dapat menurunkan pengangguran dengan persentase tertentu. Studi empiris terbaru oleh (Aginta et al., 2025) menunjukkan bahwa hubungan ini berlaku di Indonesia, namun kekuatannya bervariasi antarwilayah tergantung tingkat industrialisasi.

#### c. Teori Search and Matching

Mortensen dan Pissarides (1994) menyatakan bahwa pengangguran juga disebabkan oleh friksi informasi di pasar tenaga kerja. Dalam ekonomi digital, internet berfungsi mengurangi friksi tersebut dengan mempercepat proses pencocokan pekerjaan (*job matching*). (Kusumawardhani et al., 2023) menemukan bahwa akses internet

meningkatkan peluang pekerjaan penuh waktu, terutama di sektor informal. Namun, Arifin & Heriqbaldi (2023) memperingatkan bahwa digitalisasi juga mempercepat otomatisasi dan menggeser jenis pekerjaan tertentu, terutama di sektor padat karya. Oleh karena itu, pengaruh internet terhadap pengangguran bersifat dua arah, tergantung kesiapan infrastruktur digital dan literasi masyarakat.

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara kebijakan fiskal dan transformasi digital terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh selama periode 2011–2024. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan karakteristik penelitian ekonomi yang mengutamakan pengukuran hubungan antarvariabel melalui data numerik yang diolah secara statistik. (Sugyono, 2013), pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji teori dengan cara meneliti hubungan antarvariabel dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis yang objektif. Pendekatan ini mampu menunjukkan arah dan besarnya pengaruh antarvariabel, baik secara parsial maupun simultan, sehingga relevan digunakan dalam penelitian kebijakan ekonomi daerah.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder *time series* yang dari tahun 2011 - 2024. Data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* sebagai variabel dependen (Y), *Logaritma natural realisasi belanja bantuan sosial Provinsi Aceh (Ln BANSOS)* sebagai variabel independen ( $X_1$ ), *Pertumbuhan Ekonomi (%)* sebagai variabel independen ( $X_2$ ), *Penggunaan Internet (%)* sebagai variabel ( $X_3$ ). Data keuangan dinyatakan dalam satuan rupiah dan ditransformasi ke

logaritma natural untuk menstabilkan varian dan mengurangi heterogenitas antar tahun.

Menurut (Siti Fadjarajani, 2020) penelitian kuantitatif dengan data sekunder memiliki keunggulan karena dapat menggambarkan fenomena sosial-ekonomi secara sistematis dan berkelanjutan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid karena diperoleh dari lembaga resmi pemerintah, memiliki konsistensi antarperiode, serta dapat diuji kembali oleh peneliti lain.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (Ordinary Least Squares – OLS) yang diestimasi menggunakan EViews 12. Menurut Gujarati, (2009), model OLS digunakan untuk mengukur hubungan linier antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen secara bersamaan, dengan tujuan memperoleh estimasi parameter yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*. Dalam konteks penelitian ini, model regresi yang digunakan ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Untuk memastikan hasil estimasi memenuhi kriteria *BLUE*, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan Autokorelasi. Selanjutnya uji hipotesis untuk menilai signifikansi pengaruh antarvariabel. Uji *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, sedangkan uji *F* digunakan untuk menilai pengaruh simultan semua variabel independen terhadap pengangguran. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$  (5%), sehingga variabel dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai *p-value* < 0,05. Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi tingkat pengangguran dijelaskan oleh variabel belanja bantuan sosial,

pertumbuhan ekonomi, dan penggunaan internet.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Uji Asumsi Klasik

###### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Jarque–Bera Test* pada EViews. Hasil pengujian menunjukkan nilai Jarque–Bera sebesar 0.793005 dengan probabilitas 0.672669. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Maka, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

###### b. Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan nilai VIF tertinggi sebesar 1.854835 dan terendah sebesar 1.091421, seluruhnya berada di bawah ambang batas 10. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen, sehingga masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang unik dalam model.

###### c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil *White Test* menunjukkan F-statistic sebesar 0.575032 dengan Prob(F) = 0.7749 serta Obs\*R-squared sebesar 7.896647 dengan Prob(Chi-Square) = 0.5446. Seluruh nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

###### d. Uji Autokorelasi

Nilai Durbin–Watson (DW) yang diperoleh sebesar 2.172737. Nilai DW yang berada di antara 1,5 dan 2,5 menunjukkan bahwa model bebas dari autokorelasi, baik positif maupun negatif.

Dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik, yaitu normalitas, tidak adanya multikolinearitas, homoskedastisitas, dan bebas autokorelasi. Dengan demikian, hasil estimasi yang diperoleh memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

## Uji Hipotesis

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Variabel            | Koefisien | t-Statistic | Prob.  |
|---------------------|-----------|-------------|--------|
| C<br>(Konstanta)    | 32.12817  | 5.495310    | 0.0003 |
| X <sub>1</sub> (Ln) | -3.181601 | -3.703743   | 0.0041 |
| X <sub>2</sub>      | -0.283017 | -3.107536   | 0.0111 |
| X <sub>3</sub>      | -0.063475 | -7.960629   | 0.0000 |

Data diolah dengan Eviews (2025)

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, model empiris penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 32.12871 - 3.181601X_1 - 0.283017X_2 - 0.063475X_3 + \varepsilon$$

## Uji Statistik

Tabel 2. Uji Statistik variabel

| Statistik Uji      | Nilai    |
|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.905265 |
| Adjusted R-squared | 0.876844 |
| F-statistic        | 31.85249 |
| Prob(F-statistic)  | 0.000020 |
| Durbin-Watson      | 2.172737 |

Data diolah dengan Eviews (2025)

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai R-squared sebesar 0.9053, yang berarti 90,53% variasi tingkat pengangguran di Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu kebijakan fiskal yang direpresentasikan oleh belanja bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi digital yang direpresentasikan oleh penggunaan internet. Sementara itu, sisanya sebesar 9,47% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti investasi, migrasi tenaga kerja, serta kebijakan industri daerah. Nilai F-statistic sebesar 31.85 dengan Prob(F) = 0.00002 menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Secara parsial, hasil uji *t* menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh. Variabel belanja bantuan sosial (X<sub>1</sub>) memiliki koefisien regresi -3.1816 (*p* = 0.0041 <

0.05). Artinya, setiap peningkatan log belanja bantuan sosial sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran sekitar 3,18%, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal melalui belanja sosial efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang lapangan kerja, terutama di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Temuan ini sejalan dengan pembahasan (Bonaraja Purba, 2025) yang menegaskan bahwa program bantuan sosial berperan penting sebagai jaring pengaman sosial dan instrumen kebijakan fiskal untuk melindungi kelompok rentan dari guncangan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat miskin, serta memastikan mereka tetap terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian (Aya Rumbia et al., 2022) yang menemukan bahwa belanja publik yang tepat sasaran, termasuk belanja modal dan program sosial, berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka antarprovinsi di Indonesia dengan efek yang signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran diterima.

Selain itu, menurut (Stiglitz, 2015) dalam *Creating a Learning Society*, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan sosial sangat penting untuk mempertahankan proses pembelajaran ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat di era digital. Ia menekankan bahwa tanpa kebijakan pemerintah yang aktif, pasar tidak akan mampu secara efisien menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan inovasi sosial. Dengan demikian, peningkatan alokasi belanja sosial yang tepat sasaran dapat menjadi sarana transformasi menuju masyarakat

pembelajar yang produktif dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ) menunjukkan koefisien  $-0.2830$  ( $p = 0.0111 < 0.05$ ), yang berarti setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% dapat menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,28%. Hasil ini mendukung Hukum Okun (Okun, 1962) dan penelitian (Aginta et al., 2025) yang menyatakan bahwa pertumbuhan output ekonomi memiliki hubungan negatif dengan pengangguran, khususnya di daerah dengan sektor produktif yang kuat. Lebih lanjut, hasil ini konsisten dengan pandangan (Kim et al., 2020) dalam *An Empirical Analysis of Okun's Laws in ASEAN*, yang menunjukkan bahwa hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi cenderung menguat ketika kebijakan fiskal dan investasi publik di sektor tenaga kerja berjalan efektif, terutama di negara-negara berkembang dengan struktur ekonomi yang sedang bertransformasi. Dalam konteks Aceh, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan nyata dalam mendorong penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Oleh karena itu, hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa *pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran* diterima.

Variabel penggunaan internet ( $X_3$ ) memiliki koefisien  $-0.0635$  ( $p = 0.0000 < 0.05$ ) dan menjadi variabel dengan pengaruh negatif paling kuat terhadap tingkat pengangguran. Artinya, setiap peningkatan 1% penggunaan internet di Aceh berpotensi menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,06%. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja,

terutama melalui pengembangan UMKM digital, perdagangan daring (*e-commerce*), serta ekspansi ekonomi berbasis teknologi. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Ristabet Hesda, 2023) dalam artikel *Impact of ICT on Unemployment: A Global Empirical Analysis*, yang menemukan bahwa peningkatan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara signifikan menurunkan pengangguran global, terutama di negara berkembang. Mereka menjelaskan bahwa adopsi ICT memperluas pasar tenaga kerja melalui digitalisasi rantai nilai dan menurunkan hambatan masuk ke sektor produktif bagi kelompok usia muda dan perempuan. Dengan demikian, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa *penggunaan internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran* diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan fiskal (belanja bantuan sosial), pertumbuhan ekonomi, dan transformasi digital melalui penggunaan internet memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh. Secara simultan, ketiga variabel tersebut menjelaskan 90,53% variasi dalam tingkat pengangguran. Hal ini menandakan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang efektif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta adopsi teknologi digital memiliki peran fundamental dalam menekan pengangguran di daerah berkembang seperti Aceh.

Dari perspektif teori makroekonomi, hasil ini sejalan dengan pandangan (Karl E. Case, 2020) dalam *Principles of Macroeconomics* yang menegaskan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal berfungsi sebagai *automatic stabilizer* untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan

kesempatan kerja. Ketika belanja publik diarahkan pada sektor sosial dan produktif, daya beli masyarakat meningkat dan mendorong permintaan agregat, yang selanjutnya memperkuat output dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat keberlakuan Hukum Okun di tingkat daerah. Seperti yang ditemukan (Kim et al., 2020), efek pertumbuhan terhadap penurunan pengangguran akan semakin kuat apabila diiringi dengan investasi publik dan sektor swasta yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Dalam konteks Aceh, hal ini tercermin dari meningkatnya aktivitas di sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi yang menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.

Adapun temuan bahwa penggunaan internet memiliki pengaruh negatif paling kuat terhadap pengangguran memberikan bukti empiris bahwa transformasi digital berperan penting dalam menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan baru. Menurut (Chiplunkar & Goldberg, 2022), perluasan akses mobile internet di negara berkembang telah meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dan mendorong transisi pekerjaan dari sektor informal menuju usaha kecil berbasis jasa digital. Sementara laporan (World Bank, 2024) menegaskan bahwa konektivitas internet memperluas akses pasar tenaga kerja dan mengurangi biaya pencarian pekerjaan, terutama di wilayah dengan infrastruktur ekonomi terbatas.

Dalam konteks Aceh, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan, karena digitalisasi membuka ruang kerja baru melalui *e-commerce*, *freelancer digital*, dan sektor kreatif, namun juga menuntut peningkatan literasi digital agar

masyarakat tidak tertinggal dalam proses transformasi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan digitalisasi di Aceh perlu diarahkan pada peningkatan akses internet di wilayah pedesaan, pelatihan keterampilan digital bagi tenaga kerja muda, serta dukungan kebijakan fiskal yang berpihak pada inovasi dan ekonomi kreatif daerah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat model pembangunan berbasis *inclusive growth*, di mana interaksi antara kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi digital membentuk siklus positif terhadap kesejahteraan dan kesempatan kerja. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah observasi dan keterbatasan data yang hanya mencakup beberapa indikator makroekonomi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar analisis diperluas dengan memasukkan variabel lain seperti investasi sektor swasta, pendidikan vokasi, dan kualitas infrastruktur digital guna memperkaya pemahaman tentang determinan pengangguran di daerah berkembang.

## 5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal melalui belanja bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi digital melalui penggunaan internet secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.

Secara parsial, belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal melalui program sosial efektif dalam menjaga daya beli masyarakat serta menopang keberlanjutan lapangan kerja, terutama bagi kelompok rentan. Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh negatif dan signifikan, sesuai dengan Hukum Okun, yang menegaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dapat

menekan tingkat pengangguran melalui peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor produktif. Selanjutnya, penggunaan internet berpengaruh negatif paling kuat terhadap pengangguran, menandakan bahwa transformasi digital berperan penting dalam menciptakan peluang kerja baru dan memperluas partisipasi ekonomi masyarakat di era ekonomi digital.

Temuan ini memperkuat teori makroekonomi dan pembangunan yang menekankan pentingnya interaksi antara kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi digital dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian ( $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$ ) diterima, karena ketiga variabel terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Aceh meningkatkan alokasi belanja bantuan sosial yang produktif, seperti pelatihan keterampilan digital, dukungan terhadap UMKM berbasis teknologi, serta program pemberdayaan tenaga kerja muda. Pemerintah juga perlu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi pada sektor padat karya dan pembangunan infrastruktur digital yang merata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aginta, H., Mendez, C., & Someya, M. (2025). Regional Okun's law and endogeneity: evidence from the Indonesian districts. *Applied Economics Letters*, 32(3), 329–336.  
<https://doi.org/10.1080/13504851.2023.2267814>
- Aliyah, T., & Yusuf Bahtiar, M. (2025). *Pengaruh Bantuan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat*

*Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*  
<https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1184>

- Aya Rumbia, W., Halu Oleo, U., & Tenggara, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia: Analisis Data Panel Provinsi. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiiri*.  
<https://doi.org/http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan Tenaga Kerja 2024*, Berita resmi statistik.
- Blinder, A. S. (1973). The Board of Regents of the University of Wisconsin System Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates. In *Source: The Journal of Human Resources* (Vol. 8, Issue 4).
- Bonaraja Purba, dkk (2025). *Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- BPS Aceh. (2024). *provinsi-aceh-dalam-angka-2024*.
- Chiplunkar, G., & Goldberg, P. K. (2022). *The Employment Effects Of Mobile Internet In Developing Countries*.  
<http://www.nber.org/papers/w30741>
- Damodar N. Gujarati, & Dawn C. Porter. (2009). *Basic Econometrics*. Douglas Reiner.
- Gayatri, G., Jaya, I. G. N. M., & Rumata, V. M. (2023). The Indonesian Digital Workforce Gaps in 2021–2025. *Sustainability (Switzerland)*, 15(1).  
<https://doi.org/10.3390/su15010754>
- Hasan, dkk (2022). *Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan*

- Teori dan Praktis.*  
www.penerbitwidina.com
- Heriqbaldi, U. (2023). The Effect of Digitalization and Covid-19 Pandemic on Youth Unemployment in Indonesia. In *International Journal of Economics Development Research* (Vol. 4, Issue 6).
- ILO Flagship Report. (2024). *World employment and social outlook*. <https://doi.org/10.54394/HQAE1085>
- Karl E. Case Karl E, R. C. F. S. M. O. (2020). *Principles of Economics*. Pearson.
- KEM PPKF. (2025). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ii REPUBLIK INDONESIA*.
- Kim, J., Yoon, J. C., & Jei, S. Y. (2020). An empirical analysis of Okun's laws in ASEAN using time-varying parameter model. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 540. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.123068>
- Kusumawardhani, N., Pramana, R., Saputri, N. S., & Suryadarma, D. (2023). Heterogeneous impact of internet availability on female labor market outcomes in an emerging economy: Evidence from Indonesia. *World Development*, 164. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106182>
- N Greogry Mankiw. (2016). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Okun. (1962). *Potential GNP: Its Measurement and Significance*.
- Pertiwi, C., dkk (2025). The Effectiveness of Social Assistance Distribution Policy for Extreme Poverty Eradication in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 40(3). <https://doi.org/10.22146/jieb.v40i3.10051>
- Ristabet Hesda, A. (2023). *Impact of ICT on Unemployment: A Global Empirical Analysis*. 18. <https://doi.org/10.47198/naker.v18i2.216>
- Siti Fadjarajani, dkk. (2020). Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner. In *Ana Sriekaningsih SE., MM. Dr. Ir. Achmad Daengs GS. Ideas Publishing*. [www.ideaspublishing.co.id](http://www.ideaspublishing.co.id)
- Stiglitz, J. E. (2015). *Creating A Learning Society*.
- Sugyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P. ., & Smith, S. C. . (2015). *Economic development*. Pearson.
- World Bank. (2024). *World Development Report Middle Income Trap*.
- Yunisvita, Teguh, M., Ishak, Z., & Nida, R. (2025). Full-Time Employment: An Empirical Study of the Impact of Internet use in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(1), 62–69. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16090>